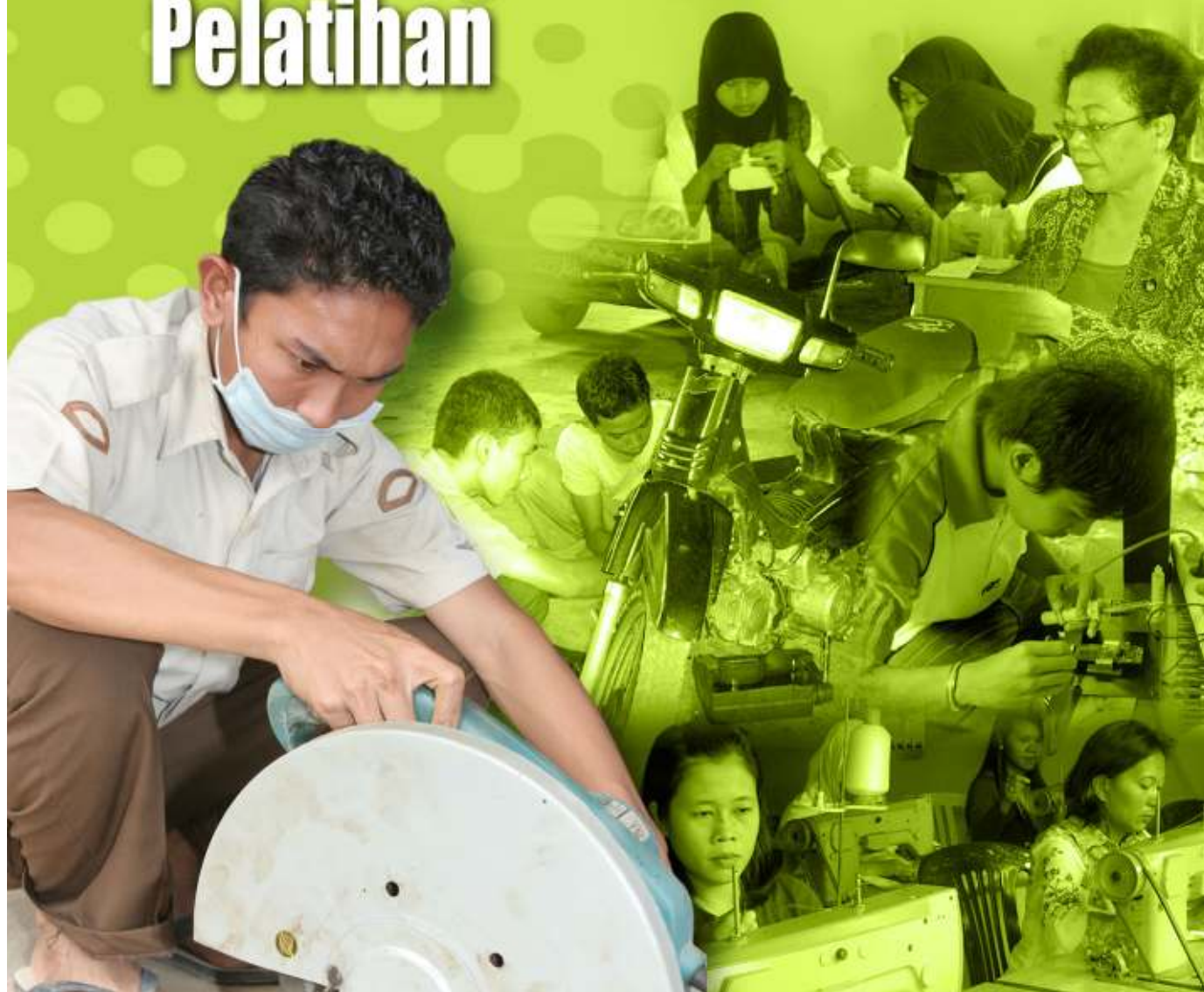




Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal  
Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

*Petunjuk Teknis*

# Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat Melalui Kursus dan Pelatihan





*Petunjuk Teknis*  
Program Pendidikan  
Kewirausahaan Masyarakat  
Melalui Kursus  
dan Pelatihan



## KATA SAMBUTAN

### Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah-satu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan pelatihan kerja. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya: 1) Kursus Para Profesi; 2) Kursus Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga Kursus dan pelatihan.

Selain itu pada tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal merintis program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yakni program pendidikan non formal yang didalamnya terdapat pendidikan kewirausahaan (pendidikan karakter berwirausaha bagi peserta didik) dan pendidikan keterampilan yang selanjutnya lulusannya ditindaklanjuti dengan berbagai Kementerian, Instansi, Lembaga dan Organisasi terkait untuk dapat merintis usaha kecil sebagai wirausaha. Misi dan tujuan dari pendidikan ini adalah memberikan bekal pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap lulusan pendidikan nonformal dapat masuk di dunia kerja dan atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Akhirnya, dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PNFI dalam penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan.

Jakarta, Januari 2010

Direktur Jenderal



**Hamid Muhammad, Ph.D**

NIP. 19590512 1983 11 1 001

## KATA PENGANTAR

### Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal PNFI

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun sebanyak 17 (tujuh belas) pedoman yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan pelatihan atau unit pelaksana teknis serta organisasi mitra di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga pedoman-pedoman ini siap untuk disosialisasikan.

Pedoman-pedoman tersebut secara garis besar mencakup: 1) Pendidikan kewirausahaan masyarakat; 2) Pemberian blockgrant pendidikan kecakapan hidup (PKH) untuk peserta didik kursus dan pelatihan baik melalui lembaga kursus dan pelatihan (LKP) maupun lembaga lain; 3) Penyusunan berbagai standar program dan sistem informasi; 4) Penguatan dan peningkatan kualitas program sertifikasi kompetensi; 5) Peningkatan kapasitas LKP dan organisasi mitra; 6) Pemberian beasiswa; 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan kursus dan kelembagaan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat.

Dengan terbitnya pedoman-pedoman dimaksud kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia yaitu, 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja yang baik. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-program pembinaan kursus dan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2010.

Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan pedoman-pedoman tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pedoman-pedoman tersebut di masa mendatang. Amien.

Jakarta, Januari 2010  
Direktur Pembinaan  
Kursus dan Kelembagaan,



**Dr. Wartanto**  
NIP. 19631009 198901 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	2
C. Dasar Hukum.....	2

### **BAB II HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT**

A. Pengertian Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat .....	3
B. Tujuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat .....	3
C. Ciri – ciri Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat .....	4
D. Tipologi ProgramPKM .....	5
E. Pengembangan Program PKM .....	8
F. Tanggung Jawab Pengembangan Program PKM .....	9

### **BAB III RUANG LINGKUP PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT**

A. Peserta Didik .....	11
B. Penyelenggara.....	11
C. Pendidik.....	12
D. Proses Pembelajaran.....	13
E. Model Pembelajaran PKM .....	14
F. Kompetensi Lulusan Program PKM.....	16
G. Pendanaan Program PKM .....	17
H. Sistem Penilaian .....	18
I. Sistem Monitoring dan Evaluasi.....	19

**BAB IV LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT**

A. Analisis Peluang Usaha.....	22
B. Pelaksanaan Pembelajaran .....	22
C. Uji Kompetensi .....	24
D. Merintis Usaha Mandiri .....	25
E. Pendamping Usaha .....	25

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>27</b>
----------------------------	-----------



### A. Latar Belakang

Pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah besar Bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan hingga saat ini. Berdasarkan data BPS pada posisi bulan Pebruari 2009, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 9.258.964 orang (8,48%) dari total angkatan kerja sekitar 113.744.408 orang. Jumlah penganggur tersebut tersebar baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, 27,09% berpendidikan SD ke bawah, 22,62% berpendidikan SLTP, 25,29% berpendidikan SMA, 15,37% berpendidikan SMK dan 9,63% berpendidikan Diploma sampai Sarjana.



Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran, diantaranya: 1) adanya kesenjangan antara *supply and demand*, jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia; 2) terjadinya *mis-match*, kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja; 3) *unskill labour*, masih adanya anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan yang tidak dapat berusaha secara mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai; 4) terbatasnya peluang kerja yang tersedia sehingga tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja, 5) terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global; 6) terbatasnya kemampuan warga masyarakat dalam mengolah sumber daya alam menjadi produk yang bernilai ekonomis sebagai sumber mata pencaharian. Kondisi tersebut di atas akan berdampak pada merebaknya masalah sosial dan tidak terberdayanya sumber-sumber daya alam yang melimpah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal mengembangkan program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yang diharapkan dapat melahirkan wirausahawan baru

dan dapat menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif dan produktif.

## B. Tujuan

Petunjuk teknis penyelenggaraan program PKM ini disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan, panduan dan arah yang jelas bagi penyelenggara program dan pihak yang berkepentingan, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan penyelenggaraan program PKM. Selain itu petunjuk teknis ini sebagai cara untuk:

1. Memperluas dan mengembangkan model kewirausahaan melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat pada satuan-satuan PNF sesuai kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, dan peluang usaha yang ada.
2. Mensinergikan program penanganan pengangguran melalui kewirausahaan yang dilaksanakan secara lintas sektoral agar terjadi kesinambungan dan saling komplementer, sehingga menghasilkan wirausaha-wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi dirinya dan orang lain serta dapat menggerakkan perekonomian di daerah.
3. Meningkatkan peran serta lembaga/satuan pendidikan nonformal, lembaga kepemudaan dan sejenisnya, dalam melaksanakan pendidikan kewirausahaan masyarakat bagi penduduk penganggur usia produktif yang potensial menjadi wirausaha.

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 31 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
5. Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal tahun 2009.

**A. Pengertian Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)**

1. Kewirausahaan adalah kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan yang harus dikuasai dan dimiliki peserta didik, yang diharapkan mampu membangun usaha sendiri atau kelompok.
2. Wirausaha adalah seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan yang diharapkan mampu membangun usaha sendiri atau kelompok.
3. Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat melalui kursus dan pelatihan adalah program pelayanan pendidikan kewirausahaan dan keterampilan usaha yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat dalam bentuk kursus dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan peluang usaha.

**B. Tujuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat**

1. Memberikan bekal pengetahuan tentang kewirausahaan kepada peserta didik.
2. Menanamkan sikap, jiwa wirausaha, dan etika bisnis kepada peserta didik.
3. Memberi bekal keterampilan di bidang produksi barang/jasa kepada peserta didik
4. Melatih keterampilan berwirausaha kepada peserta didik melalui praktek berwirausaha.
5. Menciptakan wirausahawan baru melalui kursus dan pelatihan yang didukung oleh dunia usaha dan industri, mitra-mitra usaha dan dinas/instansi terkait.

### C. Ciri-ciri Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat

#### 1. Perubahan Pola Pikir Peserta Didik

Pendidikan kewirausahaan masyarakat berorientasi pada upaya untuk mengubah pola pikir peserta didik, dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja melalui proses pendidikan yang menanamkan jiwa, etika, dan semangat berwirausaha.

#### 2. Pembekalan Sikap dan Perilaku Kewirausahaan

PKM tidak hanya membekali pengetahuan akademis tentang kewirausahaan kepada peserta didik, tetapi juga menanamkan sikap dan perilaku kewirausahaan. Dengan demikian, melalui PKM ini peserta didik diharapkan akan memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, etos kerja tinggi, berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, berani mencoba, memiliki jiwa inovasi, yang menjadi karakteristik penting dalam berwirausaha.



#### 3. Pendidikan Keterampilan

Ada dua dimensi keterampilan terintegrasi yang harus dikembangkan melalui PKM, yaitu keterampilan berwirausaha dan keterampilan produksi barang/jasa. Keterampilan berwirausaha yang dimaksud adalah seperangkat kemampuan yang dibutuhkan peserta didik untuk dapat menjalankan usaha mandiri. Keterampilan produksi barang/jasa adalah kemampuan memilih produk barang atau jasa yang memiliki peluang usaha besar, memodifikasi produk barang atau jasa yang sudah ada menjadi produk barang atau jasa yang lebih inovatif dan memiliki nilai ekonomi tinggi, atau memproduksi barang atau jasa baru yang dibutuhkan masyarakat.

#### 4. Berbasis Kebutuhan Masyarakat dan Pasar

PKM diselenggarakan atas dasar kebutuhan masyarakat dan peluang pasar akan barang atau jasa. Oleh sebab itu, identifikasi kebutuhan masyarakat dan analisis peluang pasar menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan program PKM.

#### 5. Diselenggarakan Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat

Program PKM ini diselenggarakan dari kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar, diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat sendiri dan tujuan penyelenggaraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hakekat dari, oleh dan untuk masyarakat adalah keswadayaan masyarakat sendiri sedangkan peran pemerintah adalah memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan program.

#### 6. Fleksibel

Penyelenggaraan PKM menganut prinsip *fleksibilitas*, artinya program PKM ini dalam penyelenggaraannya fleksibel dilihat dari segi waktu, tempat, jenis, dan strategi pembelajarannya. Kapan diselenggarakan, dimana tempatnya, apa jenis usahanya, dan bagaimana strategi penyelenggaraannya disesuaikan dengan kesepakatan antara penyelenggara dan peserta didik, selama tujuan akhir dari PKM tercapai.

#### 7. Solusi Permasalahan Pengangguran dan Sosial

Terbatasnya lapangan kerja yang menyebabkan persaingan dalam memperoleh kesempatan kerja yang tersedia menjadi sangat ketat. Hal ini mengakibatkan jumlah pengangguran terus meningkat karena pertambahan angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Besarnya jumlah pengangguran menimbulkan kerawanan sosial. Program PKM yang berorientasi pada upaya menciptakan wirausahawan baru, merupakan *social capital investment* yang dapat menjadi salah satu solusi mengatasi pengangguran sekaligus kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

### D. Tipologi Program PKM

Program PKM merupakan program untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan kewirausahaan sehingga mampu menjadi wirausahawan mikro, kecil, dan menengah. Artinya, setelah mengikuti program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat, diharapkan lulusan dapat menjalankan usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru bagi dirinya dan orang lain. Bidang-bidang usaha yang diharapkan muncul melalui program PKM dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu:

### 1. Wirausaha Bidang Teknologi (*Technopreneur*)



Perkembangan teknologi terjadi demikian pesat, dan pemanfaatannya hampir menyentuh pada semua aspek kehidupan masyarakat. Hal ini melahirkan peluang usaha baru bagi individu yang peka melihat peluang usaha. Program PKM diharapkan dapat menciptakan individu-individu yang memiliki kepekaan adanya peluang usaha di bidang teknologi dan memanfaatkannya dengan membuka usaha baru di bidang teknologi, diantaranya: bidang otomotif, komputer, elektronika, dan handphone.

### 2. Wirausaha Bidang Layanan Jasa (*Servicepreneur*)



Bidang layanan jasa merupakan peluang usaha yang masih sangat terbuka dan luas. Selain usaha layanan jasa yang telah ada saat ini, seperti jasa perawatan kulit dan rambut, rias pengantin, SPA, menjahit, jasa boga, seni budaya dan layanan jasa lain yang perlu digali sehingga menjadi peluang usaha jasa yang baru. Peluang ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Program PKM diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kewirausahaan yang dapat melahirkan lulusan yang mampu menjadi wirausahawan baru bidang jasa sesuai kebutuhan dan peluang usaha jasa yang ada.

### 3. Wirausaha Bidang Kerajinan Tangan (*Handmadepreneur*)



Indonesia memiliki ragam kerajinan dengan bahan baku lokal yang sangat kaya. Banyak ragam jenis kerajinan yang tersebar luas pada kelompok-kelompok masyarakat dan mengakar kuat pada budaya



setempat, misalnya anyaman bambu, ukir, mebel, anyaman rotan, seni patung, dan kriya. Kerajinan tersebut sebagian sudah menjadi sentra usaha kerajinan, namun ada yang masih membutuhkan bantuan sentuhan teknologi, manajemen, maupun pemasaran. Hampir di semua daerah ada model kerajinan khas dengan bahan baku lokal yang potensial untuk dikembangkan menjadi peluang usaha yang menjanjikan, karena permintaan pasar besar (*whole sale*) dengan sasaran pasar lokal dan global yang terbuka luas, cenderung tinggi, dan berkesinambungan.

Bidang kerajinan khas suatu kelompok masyarakat dengan bahan baku lokal belum dihayati dengan baik sebagai sumber sekaligus sasaran dari kegiatan usaha, sehingga orientasi pasar menjadi terbatas dan kurang ada usaha untuk memenuhi persyaratan standard pasar. Melalui program PKM diharapkan terbentuk sentra-sentra usaha bidang kerajinan yang bisa menembus pasar domestik maupun global.

#### 4. Wirausaha Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan (*Agripreneur*)



Fakta membuktikan bahwa agribisnis merupakan usaha yang paling resisten terhadap berbagai krisis. Ketahanan ekonomi Indonesia yang telah dilanda krisis ekonomi dan keuangan global, terbukti lebih disebabkan oleh ketahanan ekonomi di bidang agribisnis. Oleh karena itu, perlu diciptakan wirausaha-wan baru di bidang agribisnis atau “*agri-*

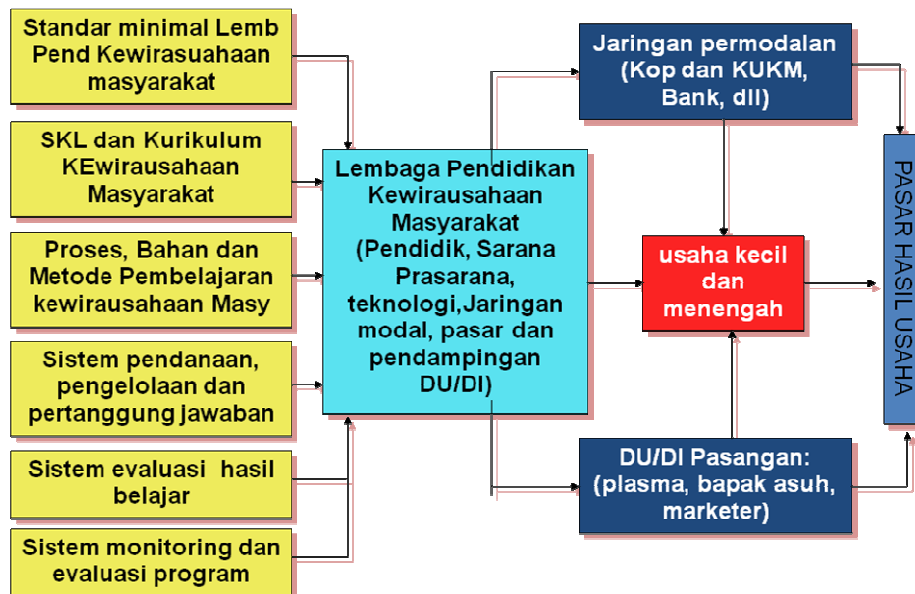
*preneur*”. Program PKM diharapkan dapat melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi kewirausahaan di bidang agribisnis, sehingga selain menjadi program dalam penanganan pengangguran melalui kursus dan pelatihan, juga dapat memberdayakan potensi sumber daya alam yang melimpah.

## E. Pengembangan Program PKM

Dalam upaya untuk mengembangkan program PKM, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menetapkan:

1. Standar Minimal Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
2. Kompetensi Lulusan dan Kurikulum Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
3. Bahan Ajar Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
4. Pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
5. Sistem Pendanaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban
6. Sistem Penilaian Hasil Belajar
7. Sistem Monitoring dan Evaluasi Program

Pola pengembangan program PKM dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Pola Pengembangan Program PKM

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa: 1) Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menyiapkan berbagai standar-standar, dana dan memberikan pembinaan, 2) lembaga penyelenggara program PKM menyiapkan sarana prasarana, pendidik, dan jaringan kerja yang relevan, 3) lulusan dari program PKM harus mampu merintis usaha yang didukung dengan jaringan permodalan, teknologi, manajemen dan pemasaran



## F. Tanggung Jawab Pengembangan Program PKM

1. Tanggung Jawab Direktorat Jenderal PNFI, meliputi:
  - a. Menetapkan standar lembaga penyelenggara program pendidikan kewirausahaan masyarakat (status, sarpras, pendidik, jaringan kerja, program dan lulusan)
  - b. Memberikan bantuan dan pembinaan
  - c. Menyusun dan menetapkan kompetensi lulusan pendidikan kewirausahaan masyarakat
  - d. Menyusun kurikulum pendidikan kewirausahaan masyarakat
  - e. Menyusun proses pembelajaran, bahan ajar dan metode pembelajaran
  - f. Menyiapkan dana pendidikan dan pedoman bansos PKM
  - g. Menyusun sistem penilaian hasil belajar
  - h. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi program
  - i. Melatih calon pendidik (*lead trainer*) dari Lembaga Penyelenggara yang akan menyelenggarakan program pendidikan kewirausahaan masyarakat
  - j. Melaksanakan pendampingan dalam rangka penjaminan mutu pendidik (*trainer*).
2. Tanggung Jawab Lembaga Penyelenggara Program PKM, meliputi:
  - a. Menyiapkan sarana dan prasarana belajar
  - b. Merekrut calon peserta didik sesuai persyaratan yang ditentukan
  - c. Menyiapkan pendidik kewirausahaan sesuai dengan bidang keahliannya
  - d. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai pedoman
  - e. Menyiapkan jaringan (akses permodalan dan mitra usaha)
  - f. Membina (melaksanakan pendampingan/*mentoring*) lulusan merintis usaha mandiri



**A. Peserta didik**

Kriteria sasaran (peserta didik) Program PKM adalah:

1. Penduduk usia produktif (Usia 16-35 tahun)
2. Belum bekerja
3. Tidak berstatus sebagai siswa atau mahasiswa
4. Memiliki minat dan motivasi yang kuat menjadi wirausaha.
5. Diutamakan dari masyarakat yang tergolong kurang mampu.

**B. Penyelenggara**

Penyelenggara program PKM adalah lembaga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Status Kelembagaan
  - a. Yayasan, Badan Usaha, Organisasi Kepemudaan, UPT/UPTD, Lembaga Pendidikan Formal atau Nonformal, dan lembaga pendidikan lain yang berbadan hukum.
  - b. Memiliki badan hukum (akta notaris), dan izin operasional dari dinas pendidikan atau instansi terkait.
  - c. Memiliki struktur organisasi yang jelas
  - d. Diutamakan sudah menyelenggarakan program kewirausahaan
2. Manajemen
  - a. Memiliki struktur organisasi yang jelas lengkap dengan rincian tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
  - b. Fungsi organisasi berjalan sesuai tugas dan fungsi
  - c. Administrasi kerja terdokumentasi dengan rapi
  - d. Memiliki rencana audit internal dan eksternal
3. Sarana dan Prasarana
  - a. Memiliki gedung atau ruang belajar
  - b. Memiliki sarana pembelajaran (teori dan praktek sesuai bidangnya)
4. Pendidik
  - a. Memiliki pendidik /instruktur keahlian sesuai bidangnya
  - b. Memiliki pendidik kewirausahaan khusus yg berpengalaman

5. Program Belajar
  - a. Menggunakan kurikulum PKM yang dikeluarkan oleh Ditjen PNFI Depdiknas
  - b. Menggunakan panduan pembelajaran dari Ditjen PNFI Depdiknas
  - c. Memiliki rencana pembinaan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah dan bersedia membina peserta didik untuk merintis usaha
6. Jaringan Usaha
  - a. Memiliki jaringan permodalan
  - b. Memiliki jaringan mitra usaha

### C. Pendidik

Pendidik program PKM terdiri atas pendidik bidang kewirausahaan dan pendidik bidang keterampilan, dengan standar minimal sebagai berikut:

1. Pendidik Kewirausahaan
  - a. Kriteria status
    - 1) Pakar atau praktisi wirausaha
    - 2) Akademisi bidang wirausaha
    - 3) Berhasil mengelola usaha dan sharing pengalaman
    - 4) Tokoh wirausaha yang menanamkan jiwa wirausaha
  - b. Pendidikan minimal SLTA
  - c. Kompetensi
    - 1) Memiliki kepribadian wirausaha
    - 2) Profesional mengelola usaha
    - 3) Mampu berkomunikasi efektif
    - 4) Mampu membangkitkan semangat wirausaha
    - 5) Mampu mengelola pembelajaran
    - 6) Mampu mengembangkan analisis usaha dan pemasaran
    - 7) Mampu membina usaha
2. Pendidik Keterampilan
  - a. Kriteria status
    - 1) Pakar atau praktisi keterampilan
    - 2) Pendidik atau akademisi bidang keterampilan

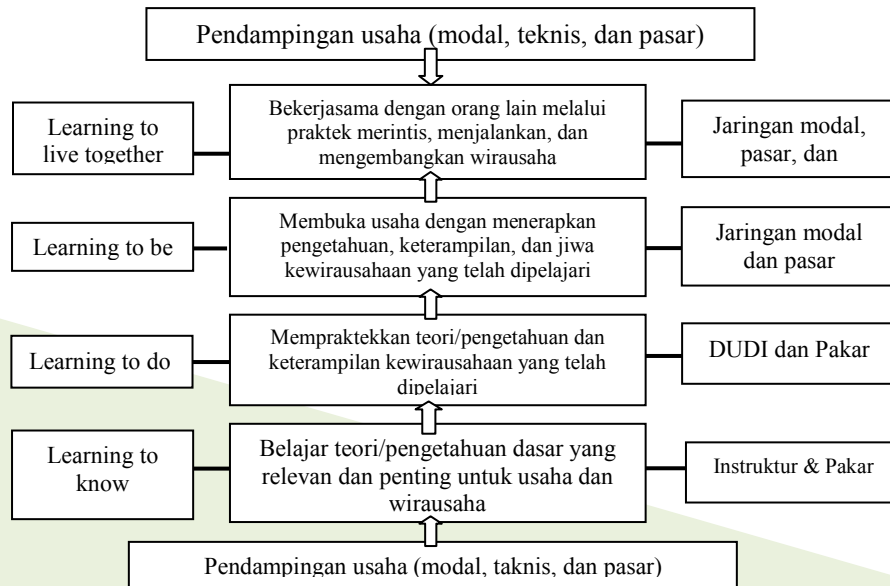


- 3) Perseorangan yang memiliki keterampilan tertentu dan diakui kemampuannya
- b. Pendidikan minimal SLTA
- c. Kompetensi
  - 1) Mampu berkomunikasi efektif
  - 2) Mampu melatih jenis keterampilan dari bahan baku, menggunakan alat, dan melalui proses tertentu menjadi barang jadi.
  - 3) Mampu melatih keterampilan jasa
  - 4) Mampu menyiapkan proses pembelajaran
  - 5) Mampu mengevaluasi hasil belajar
  - 6) Mampu memotivasi belajar

#### D. Proses Pembelajaran

Dalam upaya membentuk sosok wirausaha melalui kursus dan pelatihan, program pembelajarannya mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan bidang kewirausahaan, keterampilan produksi barang atau jasa serta merintis dan mengembangkan usaha. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang dikembangkan dalam program PKM, mengacu pada empat pilar pendidikan yaitu: 1) *learning to know*, 2) *learning to do*, 3) *learning to be*, dan 4) *learning to live together*, yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Program pembelajaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



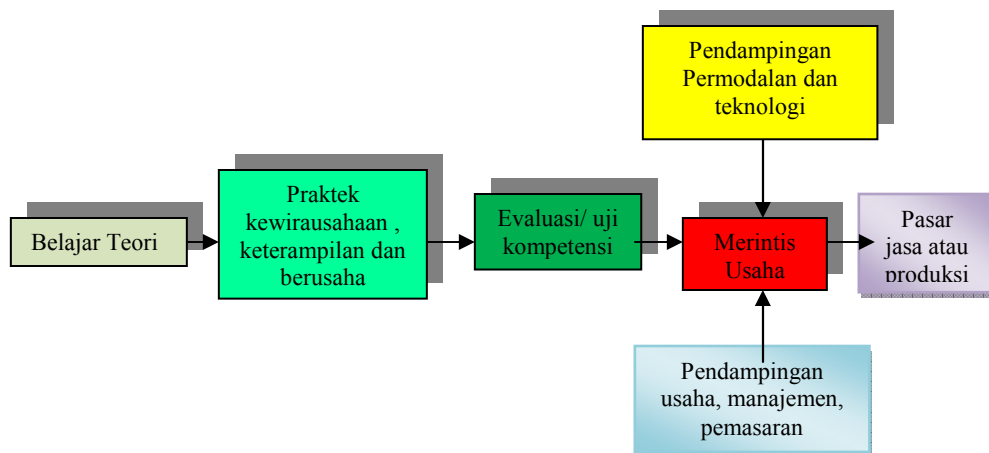
Gambar 2. Bagan Program Pembelajaran

## E. Model Pembelajaran PKM

Model pembelajaran program PKM dapat dilakukan dengan tiga pola yang disesuaikan dengan jenis, bentuk dan tingkat kesulitan dan keluasan bidang keterampilan. Model pembelajaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

### 1. Pola 1

Pada pola pertama, peserta didik mengikuti pembelajaran teori-teori (pengetahuan) yang relevan dan penting untuk usaha dan wirausaha. Selanjutnya, peserta didik diajak untuk melaksanakan praktek keterampilan dan kewirausahaan. Setelah proses pembelajaran teori dan praktek selesai diikuti, selanjutnya dilakukan evaluasi baik teori maupun praktek. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kemampuan peserta didik sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan, maka peserta didik diarahkan untuk merintis dan mengembangkan usaha mandiri. Selama dalam merintis usaha tersebut, dilakukan pendampingan baik dari segi modal, teknologi maupun manajemen. Pola pembelajaran yang pertama ini dapat digambarkan sebagai berikut:

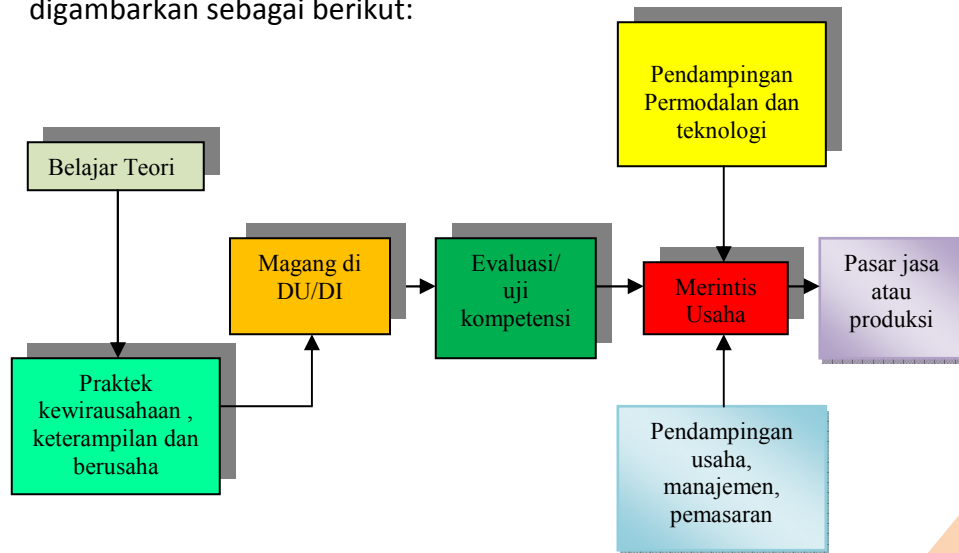


Gambar 3. Model Pembelajaran Pola 1

### 2. Pola 2

Pada pola kedua, peserta didik mengikuti pembelajaran teori-teori (pengetahuan) yang relevan dan penting untuk pembekalan kewirausahaan dan keterampilan. Kemudian, peserta didik diajak untuk melaksanakan praktek sesuai dengan teori yang telah dipelajari. Selanjutnya, setelah pembelajaran teori dan praktek selesai, peserta

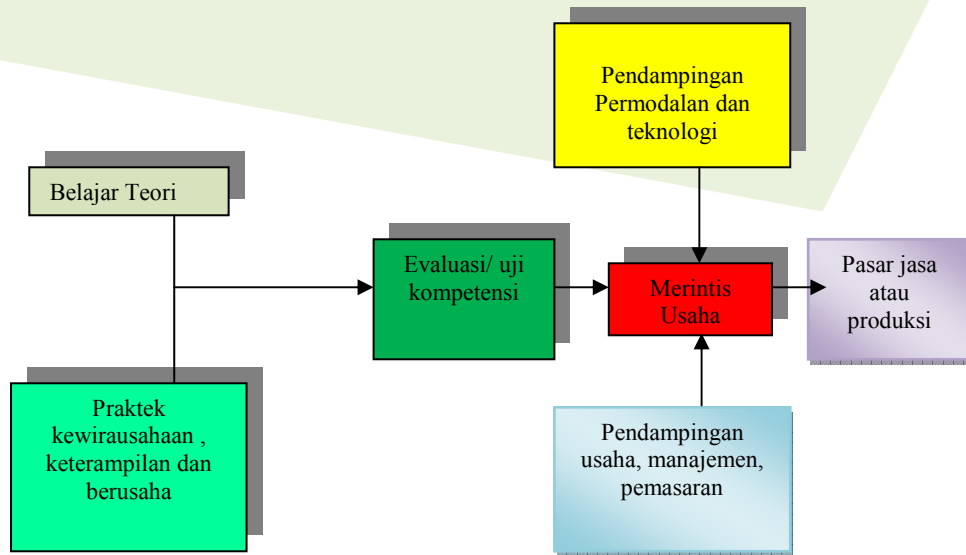
didik dimagangkan di Dunia Usaha dan Dunia Industri. Setelah proses pembelajaran teori, praktek, dan magang selesai dilakukan evaluasi baik teori maupun praktek. Apabila hasil evaluasi peserta didik menunjukkan kemampuannya sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan, maka peserta didik diarahkan untuk merintis dan mengembangkan usaha mandiri. Selama dalam merintis usaha tersebut, dilakukan pendampingan baik dari segi modal, teknologi maupun manajemen. Pola pembelajaran yang kedua ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Model Pembelajaran Pola 2

### 3. Pola 3

Pada pola ketiga, pembelajaran dilakukan dengan pendekatan *learning by doing* artinya proses pembelajarannya tidak memisahkan teori dan praktek, tetapi dilakukan langsung ditempat kerja dimana antara teori dan praktek luluh di dalamnya. Setelah proses belajar sambil bekerja dianggap selesai, maka peserta didik dilakukan evaluasi. Apabila hasil evaluasi peserta didik menunjukkan kemampuannya sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan, maka peserta didik diarahkan untuk merintis dan mengembangkan usaha mandiri. Selama dalam merintis usaha tersebut, dilakukan pendampingan baik dari segi modal, teknologi maupun manajemen. Pola pembelajaran yang ketiga ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Model Pembelajaran Pola 3

## F. Kompetensi Lulusan Program PKM

Program PKM ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki criteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kompetensi Lulusan Program PKM

No.	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1.	Memiliki Sikap Personal dan Sosial Sebagai Seorang Wirausaha	a. Memiliki etika kewirausahaan yang meliputi: sikap sopan santun, sikap jujur, disiplin, tekun, semangat kerja, tahu diri, tenggangrasa, ulet dan kesederhanaan sebagai wirausaha b. Mampu berkomunikasi sosial c. Mampu membangun jaringan usaha, d. Mampu membangun kerjasama dalam berusaha
2.	Memiliki Kemampuan Manajerial Usaha Kecil	a. Mendalami proses usaha kecil b. Menguasai pemasaran c. Menguasai administrasi usaha kecil d. Menguasai sistem jaringan usaha ( <i>supplier-buyer</i> )



3.	Memiliki Kemampuan Berfikir Logik	a. Mampu menganalisis kondisi lingkungan dan pasar b. Mampu menganalisis kondisi usaha c. Mampu mengambil keputusan dan mengambil resiko d. Mampu memanfaatkan peluang e. Menguasai inovasi usaha
4.	Memiliki keterampilan berwirausaha	a. Mampu membaca peluang usaha baru b. Mampu memilih jenis usaha yang akan dilakukan c. Mampu merencanakan usaha d. Mampu menjalankan usaha kecil e. Mampu mempertahankan usaha f. Mampu mengembangkan usaha
5.	Memiliki Keterampilan produksi/jasa	a. Mampu memilih produk yang dibutuhkan masyarakat b. Mampu mengubah produk yang sudah ada menjadi produk yang <i>inovatif</i> c. Mampu membuat produk baru yang inovatif dari bahan baku yang ada

## G. Pendanaan Program PKM

Biaya penyelenggaraan program PKM meliputi dua aspek dengan rincian biaya peruntukan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (maks 50%), yang meliputi:
  - a. Honor pendidik/instruktur
  - b. Pengadaan bahan praktek
  - c. Praktek
  - d. ATK peserta didik
2. Biaya Manajemen (maks 10%), yang meliputi:
  - a. Administrasi: pembukuan lembaga
  - b. Pengelolaan, yang meliputi:
    - 1) Biaya koordinasi
    - 2) Biaya pendampingan
    - 3) Monitoring dan evaluasi
3. Dukungan Rintisan Usaha (40%)

**Catatan:** penyelenggara program PKM wajib menyalurkan dana dukungan rintisan usaha kepada peserta didik melalui lembaga keuangan setempat (bank dan bukan bank).

## H. Sistem Penilaian

Sistem penilaian hasil belajar program PKM meliputi: 1) penilaian hasil belajar teori, 2) penilaian hasil belajar praktek, dan 3) penilaian keberhasilan usaha.

### 1. Penilaian Hasil Belajar Teori

Penilaian belajar teori dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang seperangkat pengetahuan yang harus dikuasai, termasuk internalisasi karakteristik kewirausahaan dalam diri peserta didik. Teknik penilaian yang digunakan menggunakan teknik tes maupun nontes.

Teknis tes meliputi baik tes objektif maupun uraian tentang berbagai solusi atas kasus-kasus dalam menjalankan usaha. Teknik nontes dapat berupa wawancara, angket, obeservasi maupun penulurusan dokumen hasil pekerjaan peserta didik selama proses pembelajaran teori berlangsung.

### 2. Penilaian Hasil Belajar Praktek



Penilaian belajar praktek dilaksanakan secara langsung selama peserta didik melaksanakan praktek pembelajaran, meliputi: aspek-aspek kewirausahaan, praktek keterampilan produksi barang atau jasa, praktek analisis peluang dan perencanaan usaha, praktek pembukuan dan pemasaran.

Penilaian ini dapat dilakukan melalui proses pelaksanaan praktek dan penilaian hasil kerja.

### 3. Penilaian Kemampuan Menjalankan Usaha

Komponen penilaian kemampuan menjalankan usaha mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) ketepatan dalam menganalisis peluang usaha, 2) permodalan, 3) kualitas produksi barang atau jasa, 4) pemasaran yang dilakukan, 5) manajemen dan pembukuan, 6) sikap perilaku dalam merintis usaha.

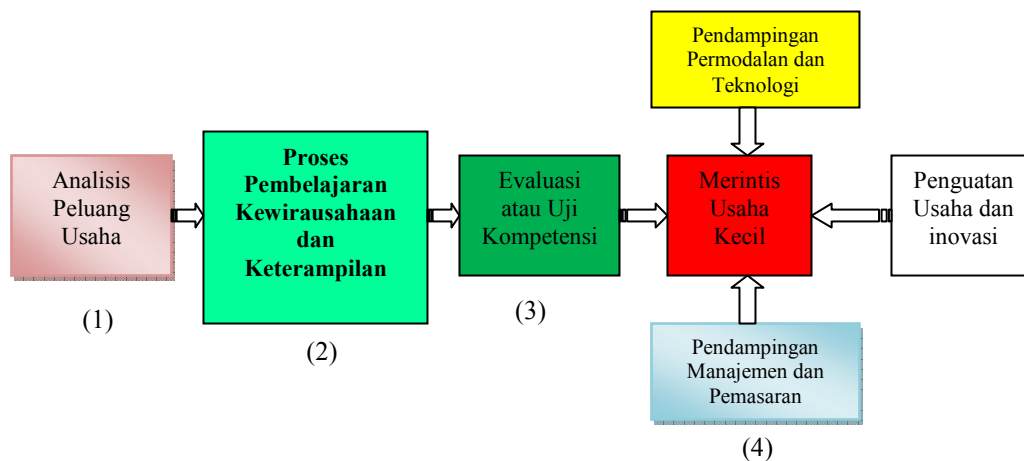
## I. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program PKM perlu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pencitraan publik. Pengendalian mutu dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

1. Petugas pengendali/pemantau terdiri atas:
  - a. Unsur Internal:
    - 1) Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, P2PNFI/BPPNFI, dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PNFI;
    - 2) Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, P2PNFI/BPPNFI, dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PNFI
    - 3) Para penilik Dikmas/PLS di tingkat kecamatan dapat berperan aktif melakukan monitoring dan evaluasi
  - b. Unsur Eksternal:
    - 1) Inspektorat Jenderal Depdiknas
    - 2) BPKP/BPK
2. Aspek pengendalian mutu meliputi:
  - a. Manajemen Program PKM
  - b. Pengelolaan dana oleh lembaga penyelenggara program PKM
  - c. Mutu layanan pembelajaran kewirausahaan
  - d. Mutu lulusan program PKM
  - e. Program tindak lanjut terhadap lulusan program PKM berupa pendampingan dalam menjalankan usaha.
3. Laporan, yang meliputi:
  - a. Laporan Teknis, yang berisi minimal
    - 1) Tingkat keberhasilan program
    - 2) Masalah dan kendala yang dihadapi
    - 3) Upaya penanggulangan permasalahan
    - 4) Tindak lanjut terhadap lulusan
    - 5) Rekomendasi program di masa depan
  - b. Laporan Keuangan
    - 1) Pembukuan pengeluaran dan pemasukan
    - 2) Tanda bukti pengeluaran anggaran
    - 3) Tanda bukti pembayaran pajak



Lembaga penyelenggara program PKM dalam menyelenggarakan program tersebut harus menggunakan strategi 4 in 1. Langkah-langkah pelaksanaan program PKM dengan menggunakan strategi tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 6. Strategi 4 in 1

#### A. Analisis Peluang Usaha

Lembaga penyelenggara program PKM sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran harus melakukan analisis peluang usaha yang sesuai dengan potensi. Langkah – langkah yang harus dilakukan dalam analisis peluang usaha adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey dan analisis kebutuhan pasar (barang atau jasa)  
Survey dan analisis kebutuhan pasar dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejumlah peluang usaha yang bisa dikembangkan berdasarkan kebutuhan pasar, kemudian menganalisis untuk menetapkan jenis usaha apa yang paling prospektif dari sekian alternatif peluang yang berhasil diidentifikasi.
2. Menetapkan jenis usaha dan keterampilan yang prospektif untuk dikembangkan/diajarkan sebagai program pendidikan kewirausahaan

## B. Pelaksanaan Pembelajaran

Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, maka lembaga pendidikan kewirausahaan masyarakat harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan jaringan kerja  
Keberhasilan dalam penyelenggaraan program sangat ditentukan oleh keterlibatan semua personel dalam organisasi penyelenggara, baik personel di dalam organisasi (internal) maupun di luar organisasi (eksternal) yang terlibat dalam penyelenggaraan program PKM. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi yang dilakukan secara intensif sehingga semua pihak dapat melakukan perannya pada setiap langkah kegiatan.
2. Menyusun kurikulum program pendidikan keterampilan dan kewirausahaan atas dasar hasil analisis peluang usaha yang telah dilakukan, penyelenggara program PKM menyusun kurikulum yang sesuai dengan bidang keterampilan produksi dan keterampilan kewirausahaan. Selanjutnya, dari kurikulum tersebut dijabarkan menjadi seperangkat bahan ajar yang dibutuhkan untuk dapat mencapai kompetensi-kompetensi kewirausahaan yang harus dicapai.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran  
Langkah selanjutnya adalah menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan, sehingga memungkinkan semua aktivitas pembelajaran dapat terselenggara dengan baik. Dalam penyiapan sarana dan prasarana pembelajaran, penyelenggara program PKM dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
4. Menyiapkan pendidik  
Pendidik program PKM terdiri atas pendidik bidang keterampilan dan bidang kewirausahaan. Pendidik program PKM harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademis dan kompetensi yang telah ditetapkan, baik untuk pendidik program pembelajaran keterampilan maupun kewirausahaan.
5. Rekrutmen peserta didik  
Peserta didik harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Rekrutmen peserta didik dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi program kepada kelompok sasaran
  - b. Seleksi persyaratan administrasi
  - c. Seleksi melalui test minat dan bakat
  - d. Wawancara
  - e. Penetapan sebagai peserta didik

## 6. Melaksanakan proses pembelajaran kewirausahaan dan keterampilan

### a. Pembelajaran Kewirausahaan

Pembelajaran kewirausahaan harus mencakup seperangkat pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan yang harus dikuasai peserta didik, yang meliputi:

- 1) Pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan, yaitu pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha atau bisnis yang akan dilakukan.
- 2) Pengetahuan tentang dasar-dasar pengelolaan usaha, yaitu pengetahuan tentang dasar-dasar pengelolaan usaha, misalnya cara merancang usaha, mengorganisasi dan mengendalikan perusahaan, termasuk dapat memperhitungkan, memprediksi, mengadministrasikan, dan membukukan kegiatan-kegiatan usaha. Mengetahui pengelolaan usaha berarti memahami kiat, cara, proses dan pengelolaan semua sumberdaya perusahaan secara efektif dan efisien.
- 3) Pengetahuan tentang sikap kewirausahaan yang terinternalisasi dalam dirinya, yaitu terbentuknya sikap yang positif terhadap usaha yang dilakukannya. Dia harus bersikap seperti pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif yang sungguh-sungguh dan tidak setengah hati.
- 4) Pengetahuan tentang pentingnya modal kepercayaan dan keteguhan hati yang cukup. Modal tidak hanya bentuk materi tetapi juga rohani. Kepercayaan dan keteguhan hati merupakan modal utama dalam usaha. Oleh karena itu, selain modal kapital, juga harus memiliki modal berupa cukup waktu, cukup tenaga, dan mental.
- 5) Pengetahuan dan kecakapan mengelola keuangan, yaitu kemampuan mengelola keuangan secara efektif dan efisien, mencari sumber dana dan menggunakannya secara tepat, dan mengendalikannya secara akurat.



- 6) Pengetahuan dan kecakapan menganalisa pasar, yaitu kemampuan untuk memahami hukum *demand-driven*, membaca kondisi pasar, memprediksi kecenderungan perubahan pasar.
- 7) Pengetahuan dan kecakapan mengelola waktu secara efektif, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Mengatur, menghitung, dan menepati waktu sesuai dengan kebutuhannya.
- 8) Pengetahuan dan kecakapan mengelola sumberdaya manusia, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan /memotivasi, dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan.
- 9) Pengetahuan dan kecakapan memelihara pelanggan, yaitu teknik memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat dan memuaskan.
- 10) Pengetahuan dan kecakapan dalam strategi bersaing, yaitu mengetahui strategi/cara bersaing dengan baik. Wirausaha harus dapat mengungkap kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*), dirinya dan pesaing. Dia harus menggunakan analisis SWOT sebaik terhadap dirinya dan terhadap pesaing.
- 11) Pengetahuan dan kecakapan dalam membuat perencanaan usaha, yaitu membuat rencana usaha, aturan, dan pedoman yang tersurat dengan jelas.

#### **b. Pembelajaran Keterampilan**

Pembelajaran keterampilan untuk jenis atau bentuk keahlian keterampilan apapun minimal mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penguasaan tentang dasar-dasar keterampilan
- 2) Penguasaan tentang bahan dan alat untuk memproduksi barang atau jasa
- 3) Kemampuan menyiapkan semua bahan dan alat serta prosedur untuk memproduksi barang atau jasa
- 4) Kemampuan memproduksi barang atau jasa
- 5) Penguasaan di bidang mutu produksi barang atau jasa
- 6) Kemampuan dalam penyajian (kemasan) produk barang atau jasa dalam pemasaran

### **C. Uji Kompetensi**

Lulusan program PKM harus memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan melalui uji kompetensi. Uji kompetensi dapat dilakukan oleh lembaga penyelenggara program PKM sendiri dan oleh pihak lain.



- a. Uji Kompetensi oleh Penyelenggara Program PKM  
Uji kompetensi oleh penyelenggara program pada dasarnya adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan pada setiap tahapan proses pembelajaran, yaitu: 1) evaluasi hasil belajar teori, 2) evaluasi hasil belajar praktek, dan 3) evaluasi hasil belajar magang.
- b. Uji Kompetensi oleh Pihak Lain  
Uji kompetensi oleh pihak lain dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:
  - 1) Dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) terkait;
  - 2) Dilakukan oleh DUDI.

#### **D. Merintis Usaha Mandiri**

Tindak lanjut dari program PKM adalah terbentuknya wirausaha-wirausaha kecil dan menengah, oleh karena itu peserta didik yang sudah memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan diarahkan dan di bina untuk merintis usaha kecil. Langkah-langkah dalam merintis usaha kecil adalah:

- a. Menganalisis lokasi yang tepat untuk memulai usaha: tepat antara jenis barang atau jasa yang dijual dengan kebutuhan masyarakat, tepat dan strategis dengan bahan baku.
- b. Merencanakan usaha kecil yang mencakup: berapa modal yang dibutuhkan, sarana-prasarana yang dibutuhkan, spesifikasi barang yang sesuai dengan kebutuhan, rencana promosi, jumlah tenaga yang dibutuhkan, dan lain-lain.
- c. Memulai usaha mandiri, yang dibutuhkan dalam memulai usaha mandiri adalah: produksi barang atau jasa, penentuan harga, ketepatan lokasi, pola promosi, administrasi, dan services.
- d. Mengembangkan usaha, dengan cara: menjaga mutu produksi barang atau jasa, diversifikasi produksi barang atau jasa, meningkatkan mutu layanan, inovasi berbagai bentuk produk atau layanan, korporasi, penguatan modal, dan penggunaan teknologi.

#### **E. Pendampingan Usaha**

Agar usaha yang telah dijalankan dapat dipertahankan dan dikembangkan, penyelenggara program PKM harus melakukan pendampingan pasca pembelajaran secara kontinu. Kegiatan pendampingan dapat dilakukan agar usaha yang dijalankan peserta didik dapat bertahan dan berkembang menjadi usaha yang bisa diandalkan. Kegiatan pendampingan yang harus dilakukan lembaga penyelenggara program PKM meliputi:

1. Memfasilitasi untuk memperoleh bantuan/pinjaman sebagai tambahan modal usaha dari bank, koperasi, bantuan modal usaha dari program pemerintah, dan sumber-sumber pendanaan usaha lainnya.
2. Membantu dalam pengembangan jejaring usaha, seperti: mitra usaha, pemasaran, dan sebagainya.
3. Melakukan pendampingan teknis, yang meliputi manajemen usaha dan peningkatan kualitas produksi.

Pola pendampingan dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengunjungi tempat usaha secara berkala, dan kegiatan pendampingan yang akan dilakukan pada setiap kunjungan sudah terprogram sesuai kebutuhan.
2. Melakukan komunikasi melalui media komunikasi yang tersedia. Pola pendampingan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan.
3. Pertemuan berkala dari semua kelompok usaha. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan selain dalam rangka pendampingan oleh lembaga kepada kelompok-kelompok usaha, juga sebagai sarana untuk tukar pengalaman antar kelompok usaha.

Pedoman ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan karakter jenis pelatihan kewirausahaan yang dipilih. Oleh karena itu, penyelenggara diharapkan dapat mengembangkan dengan kreativitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan PKM. Pedoman ini bersifat fleksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan jenis usaha dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah. Semoga pedoman ini dapat memberi arah dan memudahkan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM).





Kementerian Pendidikan Nasional  
 Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal  
 Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan  
 Gedung E Lt. 6. Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta  
 12720  
[www.infokursus.net](http://www.infokursus.net)